Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Vol. 7, No.3, Juni 2021

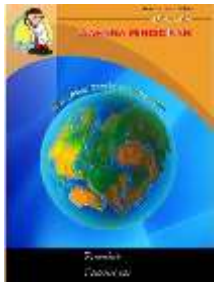

Persepsi Mahasiswa Tentang Demokrasi di Kota Maumere (Studi Deskriptif kualitif Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Nipa)

Alfian Harbiyanto

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Nusa Nipa Maumere
Email: alfiancemara@gmail.com

Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima: 30 Mei 2021
Direvisi: 7 Juni 2021
Dipublikasikan: Juni 2021
e-ISSN: 2089-5364
p-ISSN: 2622-8327
DOI: 10.5281/zenodo.4950780

Abstract:
This study aims to determine student perceptions of democracy in the city of Maumere. The research method used in this study is qualitative in the form of case study research through data collection techniques, participant observation techniques, interviews and documentation. The findings of this study are: First, the implementation of democracy in various aspects of the Maumere community, namely the implementation of civil liberty rules, the implementation of political rights for every community and the development of democratic institutions (institutional democracy) in government and society. civil. Second The condition of civil society freedom in Maumere can be seen from the relatively high level of freedom of association and assembly of civil society organizations, civil society organizations that appear in every social structure of society. The three factors that influence democracy in Maumere consist of: community welfare factors, social and political factors, civic culture and historical roots.

Keywords: *student perception, democracy*

PENDAHULUAN

Secara universal, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan bebas. Pola kehidupan politik yang kompetitif, danmemberi perlindungan terhadap kebebasan masyarakat. Pendapat yang lebih tajammenegaskan bahwa sebuah sistem demokratis jikamemberi kebebasan kepada masyarakat dalam merumuskan preferensi(pilihan) politik mereka dalam bentuk informasi, komunikasi dan organisasi, menjamin kesempatan kepada semua warga untuk bersaing secara damai dan teratur, tidak

melarang siapa pun untuk memperebutkan jabatan politik yang ada.

Jika demikian, tak ada satu pun bangsa atau masyarakat yang sempurna dalam hal praktik demokrasi.Demokrasi terlalu meminta "banyak hal" sebelum apa yang "terbaik" bisa dicapai sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi itu. Hal yang penting dipikirkan adalah bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk menentukan bukan hanya sistem politik dan budayapolitik yang di bangun, tapi lebih dari itu masyarakat yang sehat pertama- tama merumuskan cita-citakolektifnya terlebih dahulu. Pertanyaannya, untuk apa sistem politik itu harus diajukan secara terus-menerus agar politikkitabisa lebih berbudaya?

Membangun masyarakat yang demokratis bagi Indonesia merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis dan multikultural. Indonesia terkenal dengan pluralitas suku bangsa yang mendiami kepulauan nusantara. Sesungguhnya demokrasi bukan hanya masalah prosedural atau bentuk pemerintahan tetapi merupakan suatu *way of life*. Sebagai *way of life* dari suatu komunitas, maka hal tersebut tidak mungkin dicapai tanpa proses pendidikan.

Membangun masyarakat multi etnis dan budaya seperti Indonesia menuntut suatu pandanganbaru mengenai nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia yang dilahirkan sejak kebangkitan nasional telah mengalami perubahan-perubahan di dalam perkembangan yang berikutnya, khususnya di era reformasi, meminta suatu rumusan baru mengenai nasionalisme Indonesia di dalam membangun suatu nation state yang multikultural, khususnya yang diimplementasikan melalui pendidikan nasional.

Berbagai konflik horizontal di mayarakat khususnya Maumere menitik beratkan pada permasalahan konflik suku dan konflik yang secara sekilas ditengarai oleh praktik politik praktis dan pelaku politik di Maumere. Minimya pendidikan politik dan mudah terprovokasinya masyarakat oleh kelompok-kelompok kepentingan banyak menyebabkan timbulnya berbagai situasi konflik di masyarakat.

Selain potensi konflik karena pelaku politik, timbul juga permasalahan antar kelompok mayarakat yang disebabkan oleh pergesekan kebudayaan yang berkembang di Maumere. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Maumere pernah terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan rusaknya keharmonisan dan lunturnya paham pluralisme. Maka dengan demikian perlu dilakukan pendidikan yang mampu memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat dalam menuju kesejahteraan di Maumere.

Kenyataan menunjukkan bahwa kampus sebagai pusat kekuatan modernisasi dan kemajuan kehidupan bangsa nampaknya harus selalu bersilang pendapat dengan pemegang kekuasaan yang senantiasa menempatkan diri sebagai kekuatan konservatif yang selalu menolak gagasan pembaharuan untuk meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia.

Demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik kepada manusia, terutama dalam melindungi hak-hak individu menghadapi kekuasaan. Terdapat beberapa ciri apakah suatu sistem atau negara itu demokratis atau tidak, Dahl (1992) dalam Affan Gafar, (2002:8) mengemukakan sebagai berikut:(a) Didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif, berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil, (b) diakuinya secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul. (c) dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang

menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbenutknya partai-partai politik, (d) diciptaknnya sesuatu badan kehakiman yang bebas, dan (e) didirikannya kekuatan-kekuatan militier, keamanan dan kepolisian yang tidak memihak.

Gaffar, (2002:7) menarik kesimpulan sejumlah persyaratan untuk mengamati apakah sebuah political order merupakan sistem yang demokratis atau tidak, antara lain akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, danmenikmati hak-hak dasar.Dengan melihat indikator diatas maka perkembangan demokrasi di Indonesia berada pada posisi demokrasi beku dengan melihat berbagai fenomena hukum sosial dan politik yang terjadi. Selanjutnya bermuculan masalah sosial lainya seperti KKN, dan menguaknya berbagai kasus kekerasana dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Winataputra (2002:119) mengatakan bahwa *ethos* demokrasi sesungguhnya tidak diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami, oleh karena itu pendidikan demokrasi sangat penting artinya dalam upaya pembentukan warga negara yang demokratis.Maksud pendidikan demokrasi menurut (UNESCO) untuk kawasan asia pasifik (2000: 57) dalam Budimansyah (2012: 52) dikemukakan bahwa tujuan pendidikan demokrasi adalah sebaga berikut:

1. Meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang prinsip demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, lembaga politik, demokrasi dalam praktek, dan masalah-maslah demokrasi.
2. Menanamkan sikap dan nilai-nilai yang mengembangkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memperkuat tingkahlaku demokrasi.

Berdasarkan tujuan pendidikan demokrasi sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka pembelajaran demokrasi harus mampu menangkap hakikat dan prinsip demokrasi, bentuk pemerintahan, lembaga negara, demokrasi, serta demokrasi dalam praktek dan masalah-masalah demokrasi. Disamping itu juga harus mampu menanamkan sikap yang demokratis dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengann nilai demokratis dan budaya Indonesia.

Perilaku dan kultur demokrasi menunjuk pada nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo (1983) dalam Budiardjo, M. (2009:62-63), nilai-nilai demokrasi meliputi:

a) Menyelesaikanperselisihandengan damai dan secara melembaga(*institutionalizedpeaceful settlement of conflict*).
b) Menjalin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
c) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
d) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
e) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
f) Menjamin tegaknya keadilan.

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi,

konsensus, atau mufakat. Kalau golongan-golongan yang berkepentingan tidak mampu untuk mencapai kompromi, maka akan ada bahaya dan keadaan semacam ini akan mengundang kekuatan-kekuatan dari luar untuk campur tangan dan memaksakan kehendak dengan kekerasan sehingga tidak tercapainya kompromi atau mufakat.

Multikulturalisme berkaitan erat dengan epistemologi. Berbeda dengan epistimologi filsafat yang memberi arti kepada asal-usul ilmu pengetahuan. Demikian pula epistimologi di dalam sosiologi yang melihat perkembangan ilmu pengetahuan di dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Multikulturalisme dalam epistimologi sosial mempunyai makna yang lain. Dalam epistimologi sosial, tidak ada kebenaran mutlak. Hal itu berarti ilmu pengetahuan selalu mengandung arti nilai. Di dalam suatu masyarakat, yang benar adalah yang baik bagi masyarakat itu, biasanya dibudayakan pada anggota masyarakatnya melalui belajar (Tilaar, 2004: 83).

Pada masa awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui di daerah etnis dan kulturnya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu, sering berdampak pada primordialisme kesukuan, agama, dan golongan yang berlebihan. Faktor ini penyebab timbulnya permusuhan antar etnis dan golongan. Melalui pendidikan multikultural sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage* (cara individu bertingkah laku), *folkways* (kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *customs* (adat istiadat suatu komunitas). Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik.

Mahasiswa sebagai kelompok kekuatan koreksi yang membawakan hati nurani masyarakat yang tertindas oleh orientasi kekuasaan yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada orientasi pada kemajuan bangsa. Mahasiswa memiliki kecerdasan berdasarkan fokus keahlian yang diambilnya dan mahasiswa juga mampu menerapkan keilmiahan pendidikan yang diperolehnya di masyarakat. Maka dengan membentuk organisasi baik itu *dependent* maupun *independent*, mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk menerapkan apa yang telah diperolehnya dari bangku perkuliahan itu dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Atau dengan kata lain mampu menciptakan dan memberi jawaban atas permasalahan- permasalahan rakyat. Demonstrasi umumnya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Demonstrasi dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Nusa Nipa Maumere Tentang Demokrasi di Maumere.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berimplikasi pada penggunaan ukuran-ukuran kualitatif secara konsisten, artinya dalam pengolahan data, sejak mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan menyimpulkan data tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Selanjutnya Creswell (2010:15) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah*: Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The*

researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Melalui penelitian studi kasus diharapkan peneliti dapat menyelidiki secara cermat suatu program berdasarkan prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang obyektif dan mendalam tentang fokus penelitian. Pendekatan studi kasus dipilih karena permasalahan yang dijadikan fokus penelitian ini hanya terjadi ditempattertentu yaitu program studi yang mendapatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanUniversitas Nusa Nipa Maumere.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. MenurutSugiyono (2012:225), sumber data ada dua macam yaitu sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *naturalsetting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada obervasi berperanserta *(participant observation)*, wawancara mendalam *(in depth interiview)* dan dokumentasi.

Selanjutnya menurut Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman (Sugiyono, 2011: 225), "*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, indepth interviewing, document review*". Dari pendapat di atas bahwa dalam penelitian kualitatif alat pengumpul data yang digunakan yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, panduan wawancara dan dokumen.

Dalam penelitian ini analisis data mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (2007: 16-19) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

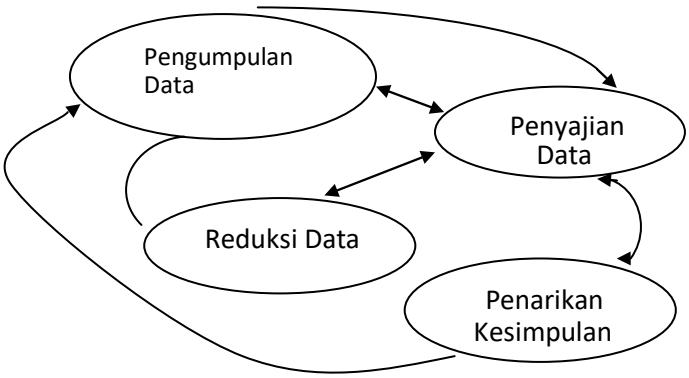

Gambar 1. Komponen Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (2007:20)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan demokrasi di Maumere dan keterlibatan mahasiswa dalam demokrasi terlihat bahwa demokrasi terlaksana dengan prinsip kebebasan sipil, hak politik, lembaga

demokrasi di pemerintah dan masyarakat sipil. Lembaga, pemerintahan, organisasi dan perkumpulan masyarakat dilihat dari tingkat kebebasan berserikat dan berkumpul dari organisasi masyarakat sipil yang relatif tinggi, organisasi masyarakat sipil yang muncul dalam setiap struktur sosial masyarakat.

A. Pelaksanaan Demokrasi di Maumere

Demokrasi adalah pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Menurut mahasiswa, Demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Selanjutnya, mahasiswa menegaskan bahwa demokrasi itu terkait kebebasan berpendapat, telah terbuka ruang komunikasi publik antar sektor, salah satu faktor yang menjadi stimulasi komunikasi publik diantaranya adalah kolom pengaduan publik di media cetak terkait proses pemerintahan dan kemasyarakatan, disisi lain kita dapat melihat ekspresi masyarakat dalam bentuk aktifitas demonstrasi dalam ruang publik. Hal ini mengindikasi bahwa masyarakat membutuhkan ruang komunikasi verbal dalam bentuk media alternatif demikian.

Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu salah satu bentuk kegiatan berdemokrasi di Indonesia yaitu pemenuhan hak-hak politik,selainkebebasan sipil dan lembaga demokrasi. Pelaksanaan dan perkembangan sejumlahaspek demokrasi yaitu pelaksaaan aturan kebebasan sipil (*civilliberty*),terlaksanya hak-hakpolitik (*political rights*) bagi setiap masyarakat,dan berkembangya lembaga-lembagademokrasi (*institution democracy*) di pemerintahan dan masyarakat sipil.

Secara informan demokrasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lainya, seperti yang diungkapkan mahasiswa yaitu kelebihan sistem pemerintahan Demokrasi meliputi : memberi kesempatan untuk perubahan di tubuh pemerintahan tanpa menggunakan kekerasan, adanya pemindahan kekuasaan yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum, sistem demokrasi mencegah adanya monopoli kekuasaan, dalam budaya demokrasi, pemerintah yang terpilih melalui pemilu akan memiliki rasa berutang karena rakyat yang memilihnya. Oleh karena itu hal ini akan menimbulkan pemicu untuk bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat, dan masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi yang menimbulkan rasa memiliki terhadap negara.

Demokrasi empirik mensyaratkan sejumlah kriteria untuk melihat apakah demokrasi betul-betul terwujud dalam suatu negara. Kriteria itu antara lain dikemukakan oleh Dahl (1992) dalam Affan Gafar, (2002:6) yang mengajukan tujuh indikator bagi demokrasi secara empirik, yaitu:

1. *Control over goverment decision about policy is constitutinality vested inelected officials.*
2. *Elected officials are chosen and peacefully remamend in relatively frequent, fair, and free election ini which content is quite limited.*
3. *Pratically all adulthave the right to vote in these elections.*
4. *Most adults have the reight to run for public afflleas for which candidates rub in these elections.*
5. *Citizens have an effectivelly enforeed right t fredoom of expresions, particulerty political exprestion including crtitisem of he officials, the conduct*

of the govermet, the presxaling political, economic and social system and the demintion ideology.

6. *The also have accses to alternative sources of information that are not monopolized by the goverment ar any authier singer group.*
7. *Finally thay have and effectively enfroced right to from and join autonomous association, including political association such as political parties and interest group, than attempt to influencs the goverment by competing in elections and by orther peaceful means.*

Indikator yang diajukan oleh Dahl sebagaimana tersebut diatas menunjukan bahwa dalam suatu negara demokratis perlu adanya kontrol terhadap keputusan-keputusan pemerintah dalam pemilihan pejabat.Adanya pemilihan secara bebas dan affair, hak pilih inklusif dimana setiap orang dewasa memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah, hak ikut pemilihan kepala daerah, adanya kebebasan berekspresi, warga negara memiliki hak untuk mencari sumber informasi, dan hak untuk membentuk asosiasi atau organisasi termasuk partai-partai politik yang *independent.*

Salah satu variabel utama terkait kebebasan sipil adalah kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, dalam hal ini kondisi di Maumere sudah baik, dalam perspektif gender kita dapat melihat bahwa ruang partisipasi perempuan dalam sektor publik cukup terasa, tercatat beberapa pimpinan daerah dipegang oleh kaum perempuan (Kades,anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD) demikian pula di lembaga politik juga telah didorong untuk keterwakilan kuota perempuan sebesar 30 %. Disisi lain kita melihat adanya kecenderungan dorongan masyarakat berbasis kedaerahan yang menyuarakan isu diskriminasi masyarakat lokal.

Hak-hak dalam berpolitik termanifestasi dalam proses pemilihan dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut, sejauh mana masyarakat mendapatkan hak untuk memilih dan dipilih, serta seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik, kalau dicermati, tingkat partisipasi masyarakat di Maumere dalam pemilu relatif rendah.

Sikap apatisme dan kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih, dapat diindikasikan lemahnya aspek hak-hak politik warga negara. Tampaknya proses demokratisasi harus didorong secara substansial tidak hanya prosedural semata, dari aspek formalnya seolah telah terjadi proses demokratisasi namun, di arus bawah sepertinya tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi kita, sehingga menimbulkan sikap apatis tersebut.

B. Keterlibatan Masyarakat *(civil society)* Dalam Demokrasi di Maumere

Secara umum informan memberikan keterangan bahwa kondisi kebebasan sipil di Maumere relatif cukup baik, hal ini dapat tergambar dari tingkat kebebasan berserikat dan berkumpul dari organisasi masyarakat sipil yang relatif tinggi, organisasi masyarakat sipil yang muncul dalam setiap struktur sosial masyarakat, walaupun kecenderungan kelembagaan yang dominan lebih didominasi yang bersifat primordial ketimbang yang berbasis minat bakat dan perkumpulan profesi.

Tingkat kondusifitas terkait masalah keberagamaan dan keberyakinan masyarakat di Maumere cukup terjaga, model konflik yang muncul akibat masalah ini relatif kecil, hal ini tentunya sangat dipengaruhi kondisi kultural masyarakat di Maumere yang

heterogen sehingga adaptabel terhadap alkuturasi dan asimilasi budaya.

Mahasiswa menegaskan, peran pemerintah sebagai pendorong *civil society* juga merupakan dorongan yang cukup signifikan, pemerintah yang semakin demokratis juga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam setiap proses politik. Kesempatan yang luas tersebut adalah transparasi pemerintah dan keterbukaan bagi masyarakat guna memperoleh informasi. Selain itu peran pemerintah guna memberikan kebebasan dan kesempatan, pemerintah juga memberikan kebebasan pers seluas-luasnya, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya media yang dibredel seperti pada era Orde Baru. Dalam hal lain adanya Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagai semua warga negara untuk melakukan gugatan terhadap undang-undang yang tidak adil, serta adanya supremasi hukum juga memberikan jaminan bahwa setiap masalah selalu diselesaikan dalam koridor hukum. Pengakuan akan HAM juga semakin ditingkatkan selama perjalanan reformasi yang sudah berlangsung selama ini, hal tersebut juga semakin memberikan pemberdayaan bagi *civil society* guna menopang proses demokratisasi itu sendiri.

Civil society berperan dalam meningkatkan kapasitas organisasi partai dalam menjalankan fungsinya, melalui berbagai bentuk pelatihan pengembangan kapasitas. Sebagai lembaga yang memiliki sumber daya manusia yang diakui eksistensi dalam pembangunan, *civil society* juga menyediakan para aktor dan pimpinannya sebagai kandidat yang mumpuni dalam ajang pemilihan umum, baik untuk legislatif ataupun eksekutif. Pada saat yang bersamaan, *civil society* juga dapat berperan dalam mobilisasi para pemilih untuk dapat memilih pemimpin partai politik yang sesuai dengan arah dan kepentingan mereka sebagai pemilih.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Demokrasi di Maumere

Salah satu variabel utama terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Maumere di pengaruhi oleh beberapa hal yang besinggungan secara langsung dengan tatanan demokrasi yakni terdiri dari:

- Faktor kesejahteraan masyarakat
  Kesejahteraan masyarakat pada umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Dengan kata lain, apabila suatu negara ingin hidup demokratis, maka masyarakat tersebut harus dapat melewati dari status miskin dalam perspektif ekonomi.
  Alasan mengapa faktor ekonomi menjadi faktor utama bagi status suatu negara demokrasi, yaitu: bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan syarat suatu masyarakat demokratis. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara.
- Faktor sosial dan politik
  Faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi di suatu masyarakat adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Dalam hal ini, karakter dan tingkat keretakan sosial merupakan faktor utama. Suatu pemikiran penting yang perlu diantisipasi adalah apakah batas-batas antara kelompok-kelompok etnis itu kuat atau lemah.
- Faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah
  Wilayah yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan demokratis ini disebut masyarakat *civic* (berkewarganegaraan) atau dikenal pula "*community civic".* Masyarakat demikian memiliki ciri-ciri adanya keterikatan berkewargenegaraan, berpartisipasi secara aktif, dan tertarik dengan masalah-masalah publik *(civic*

vertue). Dalam masyarakat tersebut terdapat hubungan politik yang berdasarkan asas persamaan derajat, tidak hierarki, saling percaya, solidaritas dan toleransi antar sesama.

Masyarakat *civic* berhasil menciptakan masyarakat sebagai modal dasar *(social capital).* Masyarakat sebagai modal di sini berbeda dengan modal dalam ekonomi, uang *(economic capital)* maupun dengan manusia sebagai modal *(human capital)*, seperti pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan. Modal masyarakat dapat meliputi suatu kondisi saling peraya antar sesama, ada norma yang mengatur tentang saling percaya tersebut, ada jaringan sosial, seperti asosiasi dan masyarakat yang memadukan norma-norma ini dengan sikap saling percaya. Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengaturkehidupan bersama berdasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Harris G. Warrant dalam *Our Democracy at Work (1963: 2)*, memberikan rumusan pengertian demokrasi sebagai*"a government of the people, by the people, for the people"*. Bryan A. Garner dalam *Black"s Law Dictionary (1999: 444)*, memberikan arti demokrasi sebagai*"government by the people, either directly or through representatives".*

Demokrasi akan mempunyai konsekuensi demokrasi yang harus diperhatikan, yakni memberikan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk menjalankan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara. Dengan kata lain, ketika kesempatan-kesempatan yang merupakan konsekuensi dari standar ukuran umum negara demokrasi tersebut tidak dijalankan, maka negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara demokratis.

Sebuah demokrasi idealnya memiliki : Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat,partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif,pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis,kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyakat, danpencakupan, yaitu terliputnya masyarakat yang tercakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Keberadaan lembaga perwakilan dalam demokrasi modern sangat penting dalam suatu negara bangsa (Strong, 1960: 171). Bentuk lembaga perwakilan menurut John Stuart Mill merupakan pilihan bentuk pemerintahan yang ideal. Dikemukakan oleh Mill dalam *Utilitarianism Liberty Representative Government*

(1988: 233), sistem perwakilan dalam demokrasi modern: "*……but since all cannot, in a community exceeding a single small town, participate personally in any but some very minor portions of the public business it follows that the ideal type of a perfect government must be representative".*

Melalui lembaga perwakilan, persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi masyarakat akan dapat diselesaikan. Dengan demikian lembaga perwakilan berfungsi untuk menjembatani dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu secara umum lembaga perwakilan ini mempunyai fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai sarana pendidikan politik (Saragih, 1988: 88). Fungsi-fungsi ini dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam rangka mewujudkan cita-cita demokrasi modern yang dewasa ini

diikuti oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

Penggunaan fungsi-fungsi tersebut secara teoritis mudah dipahami, tetapi dalam tataran praktek sulit dilakukan. Kesulitan ini muncul karena lembaga perwakilan lebih menempatkan sebagai perwakilan politik daripada perwakilan rakyat. Secara teoritis dalam masyarakat terdapat tiga prinsip perwakilan, yaitu perwakilan melalui partai politik *(political representative)*, perwakilan daerah*(regional representative)* dan perwakilan fungsional atau utusan golongan *(functional representative),* (Ashiddiqie, 2002: 183-184). Di samping itu, di dalam masyarakatmasih terdapat juga adanya *„representation in ideas"* yang mungkin belum tertampung oleh representasi yang telah ada. Oleh karena itu, apa yang diputuskan oleh lembaga perwakilan belum tentu dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut mahasiswa tentang tidak tertampungnya representasi tersebut merupakan keadaan demikian akan memunculkan kesenjangan antara wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan dengan rakyat yang diwakilinya. Pada gilirannya akan memunculkan persoalan mendasar di seputar keberadaan lembaga perwakilan. Pertanyaan mendasar apakah si wakil itu sebatas mewakili partai politik yang merupakan induk tempat bernaung dalam karier politiknya, atau si wakil itu mewakili rakyat secara keseluruhan dan melepaskan ikatan dari induk partai politiknya.

Civil society berperan dalam meningkatkan kapasitas organisasi partai dalam menjalankan fungsinya, melalui berbagai bentuk pelatihan pengembangan kapasitas. Sebagai lembaga yang memilikisumber daya manusia yang diakui eksistensi dalam pembangunan, *civil society* juga menyediakan para aktor dan pimpinannya sebagai kandidat yang mampu dalam ajang pemilihan umum, baik untuk legislatif ataupun eksekutif. Pada saat yang bersamaan, *civil society* juga dapat berperan dalam mobilisasi para pemilih untuk dapat memilih pemimpin partai politik yang sesuai dengan arah dan kepentingan mereka sebagai pemilih.

Untuk memahami relasi yang terjadi antara partai politik dan *civil society*, Beavis melihat ada tiga hal mendasar yaitu: Tipe dari aktivitas yang menghubungkan partai politik dan *civil society*, kekuatan dari hubungan tersebut, terlebih dalam konteks seberapa dekat dan eksklusif hubungan tersebut dibangun, danarah dari pengaruh dalam relasi tersebut. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh *civil society* dan partai politik secara bersama-sama, dimana lebih banyak fokus dalam konteks pembuatan kebijakan publik seperti advokasi atau lobi terhadap suatu isu yang sedang dibahas dalam proses pembuatan undang-undang. Dalam konteks ini, *civil society* sebagai kelompok kepentingan yang akan melobi partai politik di DPR untuk mendorong dan mendiskusikan kepentingan yang mereka ajukan. Sebagai organisasi yang independen dari kepentingan politik, *civil society* juga memiliki peran untuk memonitor janji-janji kampanye para kandidat dan partai dalam masa kampanye serta juga perilaku para politisi di DPR.

Dalam kesempatan yang berbeda, *civil society* juga dianggap sebagai wadah untuk berdiskusi tentang berbagai hal-hal penting terkait dengan isu-isu yang mereka (anggota DPR) butuhkan saat itu. Dalam konteks kebutuhan partai politik, *civil society* juga berperan dalam meningkatkan kapasitas organisasi partai dalam menjalankan fungsinya, melalui berbagai bentuk pelatihan pengembangan kapasitas. Sebagai lembaga yang memiliki sumber daya manusia yang diakui eksistensi dalam pembangunan, *civil society* juga menyediakan para aktor dan pimpinannya sebagai kandidat yang mumpuni dalam ajang pemilihan umum, baik untuk legislatif ataupun eksekutif. Pada saat yang bersamaan, *civil society* juga dapat

berperan dalam mobilisasi para pemilih untuk dapat memilih pemimpin partai politik yang sesuai dengan arah dan kepentingan mereka sebagai pemilih. Sementara itu, bila kita memperhatikan hubungan kedua institusi ini dalam aspek kedekatannya, maka, Beavis menyebutkan terdapat empat arah relasi yang terkait satu sama lain.

Dari perspektif *civil society*, paling tidak di kalangan *civil society* terhadap tiga pandangan relasi tersebut dilihat: Menghindari kontak dengan partai politik, dimana *civil society* berusaha untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik sehingga mereka tidak diklaim memiliki aktivitas yang partisan. Mendukung partai politik secara menyeluruh, tanpa ada keberpihakan. Hal ini dilihat dari komitmen *civil society* untuk mendukung partai politik berdasarkan agenda serta isu yang sama dengan kepentingan kelompok *civil society* tersebut. Beraliansi dengan satu partai politik, dalam konteks ini sebuah kelompok *civil society* atau lebih menyediakan bergagai informasi dan bentuk pelatihan hanya kepada satu partai politik, dan biasanya mereka memiliki ikatan yang kuat seperti kelompok buruh.

Dari perspektif partai politik, terdapat empat pandangan yang dapat dilakukan oleh partai politik: Memiliki jarak jauh dengan *civil society*, situasi ini mengindikasikan bahwa partai tidak memiliki hubungan dengan *civil society* atau adanya kompetisi yang keras satu sama lain sehingga tidak memiliki relasi yang dekat. Mendapat dukungan dari banyak kelompok masyarakat dalam jangka waktu yang singkat, hal ini disebabkan tergantung dari kepentingan seperti apa yang menjadi titik temu dari relasi tersebut. Memiliki hubungan jangka panjang dengan satu atau beberapa kelompok *civil society*, hal ini diindikasi dari adanya dukungan serius dan permanen dari satu kelompok *civil society* kepada satu partai politik, seperti kelompok think thank, kelompok serikat pekerja dan lain-lainnya. Dan relasi yang terputus dengan kelompok *civil society*. Hal ini dimungkinkan manakala salah satu organ partai memutuskan keluar dari partai dan bertransformasi menjadi kelompok *civil society* dengan pertimbangan efektivitas kerja dibandingkan berada di dalam partai politik.

Variabel utama terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Maumere di pengaruhi oleh beberapa hal yang besinggungan secara langsung dengan tatanan demokrasi yakni terdiri dari:

a.Faktor kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat pada umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Dengan kata lain, apabila suatu negara ingin hidup demokratis, maka masyarakat tersebut harus dapat melewati dari status miskin dalam perspektif ekonomi.

Alasan mengapa faktor ekonomi menjadi faktor utama bagi status suatu negara demokrasi, yaitu: bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan syarat suatu masyarakat demokratis. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara

b.Faktor Sosial dan Politik

Faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi di suatu masyarakat adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Dalam hal ini, karakter dan tingkat keretakan sosial merupakan faktor utama. Suatu pemikiran penting yang perlu diantisipasi adalah apakah batas-batas antara kelompok-kelompok etnis itu kuat atau lemah.

c.Faktor Budaya Kewarganegaraan dan Akar Sejarah

Wilayah yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan demokratis ini disebut masyarakat *civic* (berkewarganegaraan) atau

dikenal pula*"communitycivic".* Masyarakat demikian memiliki ciri-ciri adanya keterikatan berkewargenegaraan, berpartisipasi secara aktif, dan tertarik dengan masalahmasalah publik *(civic vertue).* Dalam masyarakat tersebut terdapat hubungan politik yang berdasarkan asas persamaan derajat, tidak hierarki, saling percaya, solidaritas dan toleransi antar sesama.

Masyarakat *civic* berhasil menciptakan masyarakat sebagai modal dasar *(social capital).* Masyarakat sebagai modal di sini berbeda dengan modal dalam ekonomi, uang *(economic capital)* maupun dengan manusia sebagai modal *(human capital),* seperti pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan. Modal masyarakat dapat meliputi suatu kondisi saling peraya antar sesama, ada norma yang mengatur tentang saling percaya tersebut, ada jaringan sosial, seperti asosiasi dan masyarakat yang memadukan norma-norma ini dengan sikap saling percaya.

Secara umum unsur-unsur penegak pelaksanaan demokrasi di Indonesia unsur-unsur yang di dukung oleh beberapa komponen sebagai penopang tegaknya demokrasi antara lain:Negara Hukum,Masyarakat Madani,Infrastruktur Politik, danPers yang bebas dan bertanggung jawab. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas, tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Masyarakat madani *(Civil Society)* mensyaratkan adanya *civic engagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik (political party), kelompok gerakan *(movement group*) dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan *(pressure/interest group).* Terbentuknya ke-tiga kelompok tersebut merupakan wujud keterlibatan dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh negara, yang dengan demikian juga bisa dikatakan sebagai pilar penegak demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analsis data secara kualitatis diperoleh kesimpulan bahwa persepsi mahasiswa Universitas Nusa Nipa yang mendapatkan mata kuliah tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang pelaksanaan demokrasi di Maumere bahwa demokrasi terlaksana dengan prinsip kebebasan sipil, hak politik, lembaga demokrasi di pemerintah dan masyarakat sipil. Lembaga perintahan masyarakat dilihat dari tingkat kebebasan berserikat dan berkumpul dari organisasi masyarakat sipil yang relatif tinggi, organisasi masyarakat sipil yang muncul dalam setiap struktur sosial masyarakat. *Civil society* berperan dalam meningkatkan kapasitas organisasi partai dalam menjalankan fungsinya, melalui berbagai bentuk pelatihan pengembangan kapasitas. Secara umum faktor yang mempengaruhi demokrasi di Maumere meliputi kesejahteraan masyarakat, sosial dan politik dan budaya kewarganegaraan atau akar sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Afan Gaffar. 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Asshidiqie J. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*. Jakarta: Kementrian Press

Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Budimansyah, D. (2012). *Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter.* Bandung: Widya Aksara pers

Cresswell, J.W. 2010. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,*

dan Mixed; Cetakan ketiga. Yokyakarta: Pustaka Belajar

Farida Hanum. (2005). *Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahasiswa Aktivis UNY.Laporan Penelitian.* Lemlit UNY.

H.A.R Tilaar. (2004). *Kekuatan dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

Manan B. (2003). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945FH*. Yogyakarta: UII Press,

Miles, M.B. & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif:* Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dan judul Qualitative Data Anlysis. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Musa Asy'arie. (2004). *Pendidikan Multikutlural dan Konflik 1-2.* www.kompas.co.id. Akses Juli 2005.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Winataputra, (*2002)*. *Demokrasi* dan *Pendidikan Demokrasi*,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.